

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023



Biru Langitku!
Hijau Bumiku!

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya juaah sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami untuk menyelesaikan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Bab VII Bagian Kedua dijelaskan bahwa Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Dengan demikian diharapkan **Program dan Kegiatan dibidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Akhirnya kami sangat menyadari dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Kuala Tungkal, 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680116 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	25
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II.....	7
Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	21
Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang dibuat ini akan mampu memberikan gambaran tentang Rencana Kinerja yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana kita ketahui bahwa Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup pemanfaatannya harus diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian Lingkungan Hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta dapat memberikan gambaran yang menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikenal saat ini pada mulanya tahun 2003 disebut Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Kapedalda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 15 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dan saat ini berubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 06 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Perbub No. 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 13 ayat (2) “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan” pasal 71 ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota `menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. peraturan presiden No.30 Tahun 2020 tentang menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : Honorium perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan diluar kantor pengadaan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia No 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 3838)

5. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 3853)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4161) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4585)
9. Peraturan pemerintah No 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4815)
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tentang pedoman pengaduan kasus pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang petunjuk Teknis Standar pelayanan minimal Badan Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.
12. Keputusan Mentri Negara Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003 Tentang pedoman penentuan status Mutu Air.
13. Peraturan Mentri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
14. Peraturan menteri dalam negeri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi ,kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keungan daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 06);

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47).
17. Keputusan menteri No.050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama 1 (satu) Tahun pada Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya dan tersusunnya Dokumen perencanaan dibidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program yang lebih terarah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mampu menopang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Dinas Lingkungan Hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 2023 atau sumber dana lainnya.
3. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup secara baik dan seimbang. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam serta terwujudnya penataan hukum di bidang Lingkungan hidup yang tertib baik terhadap masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja kegiatan yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah *Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, yang selanjutnya *dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 4 (empat) bidang urusan yaitu: Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.*

Selanjutnya Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana **Tabel 2.1.** dibawah ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan: Tahun 2022

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD	Unit SKPD Penanggung Jawab									
				K	Rp		K	Rp	T 1		T 2		T 3		T 4		Rp	K												
									Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan																														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	10.505.915.000		100%	5.162.375.791	599.235.034	26,37	1.236.776.606	24,86	1.611.708.883	21,11	851.680.481	36,36	4.273.051.004	95,96	4.324.621.004	45,39	DLH									
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan	7 Laporan	1.400.000.000		7 Laporan	126.925.000	23.850.000	22,22	20.050.000	18,47	52.650.000	26,03	50.350.000	32,91	146.900.000	99,62	198.470.000	49,62	DLH									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan renstra dan renja DLH	8 Dokumen	200.000.000	51.570.000	8 Dokumen	51.000.000	13.950.000	27,35	9.900.000	19,41	23.850.000	19,42	2.950.000	33,13	50.650.000	99,31	102.220.000	51,11	DLH										
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan RKA DLH	4 Dokumen	200.000.000		4 Dokumen	75.925.000	9.900.000	17,09	10.150.000	17,52	28.800.000	32,63	47.400.000	32,68	96.250.000	99,92	96.250.000	48,13	DLH										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Laporan Keuangan Tahunan OPD	4 Laporan	4.227.915.000		4 Laporan	3.783.021.642	457.514.542	23,45	1.113.245.835	26,12	1.351.630.884	23,85	492.020.063	22,95	3.414.411.324	96,37	3.414.411.324	80,76	DLH									
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.267.915.000		24 Orang/bulan	3.431.296.642	377.854.542	11,01	1.039.655.835	30,30	1.197.755.884	23,90	418.070.063	23,19	3.033.336.324	88,40	3.033.336.324	92,82	DLH										
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	2 Dokumen	300.000.000	57.050.000	2 Dokumen	231.540.000	52.360.000	24,99	49.860.000	23,79	104.720.000	24,99	41.950.000	23,29	248.890.000	97,06	305.940.000	101,98	DLH										
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan DLH	4 Laporan	100.000.000		4 Laporan	68.030.000	15.900.000	33,10	12.330.000	25,68	25.800.000	20,61	20.000.000	20,61	74.030.000	100,00	74.030.000	74,03	DLH										
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran setiap tahun	2 Dokumen	80.000.000		2 Dokumen	52.155.000	11.400.000	24,70	11.400.000	24,7	23.355.000	25,90	12.000.000	24,7	58.155.000	100,00	58.155.000	72,69	DLH										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	100%	32.750.000		100%	32.750.000	-	0,00	-	0	-	0,00	26.350.000	100	26.350.000	100	26.350.000	80,46	DLH									
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Paket	32.750.000		69 Paket	32.750.000	-	0,00	-	0	-	0,00	26.350.000	100	26.350.000	100,00	26.350.000	80,46	DLH										
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	638.000.000		100%	408.329.149	68.662.123	44,11	51.384.057	32,91	86.711.728	11,43	198.944.876	8,67	405.702.784	97,12	405.702.784	63,59	DLH									
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor	900 Paket	100.000.000	129.529.554	900 Paket	130.975.099	21.076.723	26,69	22.832.707	28,91	39.126.328	22,85	45.011.358	20,32	128.047.116	98,77	257.576.670	257,58	DLH										
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	1 Laporan	350.000.000	195.514.766	1 Laporan	277.354.050	47.585.400	61,52	28.551.350	36,91	47.585.400	0,00	153.933.518	-2,97	277.655.668	95,46	473.170.434	135,19	DLH										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 laporan	395.000.000		4 Laporan	242.500.000	21.812.769	27,98	21.438.714	29,35	44.465.071	22,29	4.160.442	15,37	91.876.996	94,99	91.876.996	23,26	DLH									
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Belanja Prangko, materai, benda pos & jasa pengiriman surat	1 Laporan	5.000.000	1.870.000	1 Laporan	2.500.000	1.000.000	40,00	1.000.000	40	500.000	20,00	-	0	2.500.000	100,00	4.370.000	87,40	DLH										
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	1 Laporan	180.000.000	63.927.220	1 Laporan	180.000.000	16.312.769	20,44	14.790.537	18,54	34.965.071	23,37	1.737.434	22,62	67.805.811	84,97	131.733.031	73,19	DLH										
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terperuhnya Belanja Alat - alat kebersihan kantor & jasa tenaga kebersihan	1 Laporan	60.000.000	18.013.071	1 Laporan	60.000.000	4.500.000	23,50	5.648.177	29,5	9.000.000	23,50	2.423.008	23,5	21.571.185	100,00	39.584.256	65,97	DLH										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	226 Unit	2.200.000.000		226 Unit	601.600.000	27.395.600	14,08	30.658.000	17,47	76.251.200	21,94	79.855.100	38,24	214.159.900	91,72	214.159.900	9,73	DLH									
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terperuhnya Jasa Sopir, Biaya Pemeliharaan, Perbaikan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34 Unit	200.000.000	109.779.477	34 Unit	201.600.000	23.195.600	21,64	24.658.000	23	66.951.200	40,82	43.926.100	-4,35	158.730.900	81,11	268.510.377	134,26	DLH										
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	200.000.000		19 Unit	200.000.000	-	0,00	-	0	-	0,00	35.029.000	94,06	35.029.000	94,06	35.029.000	17,51	DLH										
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terperuhnya Biaya pemeliharaan Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49 Unit	200.000.000	84.533.319	3 Unit	200.000.000	4.200.000	20,59	6.000.000	29,41	9.300.000	25,00	900.000	25	20.400.000	100,00	104.933.319	52,47	DLH										
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat																														
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			IKA/IKU/IKTL/IKAL/KEG	65/94,2/55,5/77,1/73,8	925.000.000		65/94,2/55,5/77,1/73,8	1.741.200.000	33.842.200	17,82	45.181.800	18,03	61.749.100	17,71	107.467.360	23,65	248.240.460	77,21	248.240.460	26,84	DLH									
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Laporan	640.000.000		2 Laporan	1.591.200.000	25.592.200	12,24	36.931.800	12,64	45.249.100	12,03	60.373.360	17,70	168.146.460	54,60	168.146.460	26,27	DLH									
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap	Indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air, indeks kualitas udara	1 Dokumen	490.000.000	39.200.000	1 Dokumen	1.441.200.000	17.342.200	1,23	28.681.800	2,04	28.749.100	0,81	57.873.360	5,12	132.646.460	9,20	171.846.460	35,07	DLH										
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen RAD GRK, dokumen pemantauan emisi GRK	1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	150.000.000	8.250.000	23,24	8.250.000	23,24	16.500.000	23,24	2.500.000	30,28	35.500.000	100,00	35.500.000	23,67	DLH										

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode Restra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD	Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp	T 1		T 2		T 3		T 4		Rp	K			
									Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	1 Dokumen	150000000		1 Dokumen	150.000.000	8.250.000	23,40	8.250.000	23,41	16.500.000	23,40	47.094.000	29,60	80.094.000	99,81	80.094.000	53,40	DLH
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	150.000.000	8.250.000	23,40	8.250.000	23,41	16.500.000	23,4	47.094.000	29,6	80.094.000	99,81	80.094.000	53,40	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	70%	4.760.000.000		70%	4.760.000.000	142.929.000	22,73	142.415.500	23,12	285.189.498	23,15	144.856.997	29,68	715.390.995	98,68	715.390.995	15,03	DLH
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	70%	4.760.000.000		70%	4.760.000.000	142.929.000	22,73	142.415.500	23,12	285.189.498	23,15	144.856.997	29,68	715.390.995	98,68	715.390.995	15,03	DLH
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati		Dokumen rencana pengelolaan keaneekaragaman hayati dan legalisasi	1 Dokumen	400.000.000		1 Dokumen	400.000.000	8.250.000	24,08	8.750.000	25,53	17.000.000	25,54	250.000	24,81	34.250.000	99,96	34.250.000	8,56	DLH
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		RTH yang dikelola	20 Ha	3.360.000.000		20 Ha	3.360.000.000	83.759.000	19,31	82.509.000	19,02	166.553.998	19,08	108.644.997	41,94	441.466.995	99,35	441.466.995	13,14	DLH
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana		Jumlah bibit/unit	3000 Unit	1.000.000.000		11.000 Unit	1.000.000.000	50.920.000	24,81	51.156.500	24,8	101.635.500	24,83	35.962.000	22,3	239.674.000	96,74	239.674.000	23,97	DLH
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	70%	160.000.000		70%	27.665.000	6.600.000	23,86	7.100.000	25,66	13.700.000	25,67	250.000	24,76	27.650.000	99,95	27.650.000	17,28	DLH
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	80.000.000		2 Kecamatan	27.665.000	6.600.000	23,86	7.100.000	25,66	13.700.000	25,67	250.000	24,76	27.650.000	99,95	27.650.000	34,56	DLH
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	80.000.000	16.800.000	1 Dokumen	27.665.000	6.600.000	23,86	7.100.000	25,66	13.700.000	25,67	250.000	24,76	27.650.000	99,95	44.450.000	55,56	DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			PERESNTASE MASYARAKAT KECAMATAN YANG MENINGKAT PENGETAHUAN / PEMAHAMAN TERKAIT	70%	130.000.000		70%	27.665.000	6.600.000	23,86	7.100.000	25,66	13.700.000	25,67	250.000	24,76	27.650.000	99,95	27.650.000	21,27	DLH
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota			Jumlah sosialisasi/pelatihan	6 sekolah	130.000.000		6 sekolah	27.665.000	6.600.000	23,86	7.100.000	25,66	13.700.000	25,67	250.000	24,76	27.650.000	99,95	27.650.000	21,27	DLH
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga		Jumlah sosialisasi/pelatihan	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	130.000.000	16.800.000	6 Lembaga	27.665.000	6.600.000	23,86	7.100.000	25,66	13.700.000	25,67	250.000	24,76	27.650.000	99,95	44.450.000	34,19	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	100%	145.000.000		100%	34.265.000	8.250.000	24,08	8.750.000	25,53	17.000.000	25,54	250.000	24,81	34.250.000	99,96	34.250.000	23,62	DLH
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	145.000.000		100%	34.265.000	8.250.000	24,08	8.750.000	25,53	17.000.000	25,54	250.000	24,81	34.250.000	99,96	34.250.000	23,62	DLH
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Kota		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	3 Dokumen	75.000.000	14.900.000	3 Dokumen	34.265.000	8.250.000	24,08	8.750.000	25,53	17.000.000	25,54	250.000	24,81	34.250.000	99,96	49.150.000	65,53	DLH
Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat																					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	3 Dokumen	520.000.000		3 Dokumen	2.534.265.000	18.750.000	12,96	128.400.000	22,50	198.750.000	27,00	805.564.000	23,87	1.151.464.000	86,31	1.151.464.000	221,44	DLH
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota			Terlaksananya penyusunan dokumen DDDTLH, Dokumen RPPLH yang dilegalisasi	1 dokumen	70.000.000		1 Dokumen	34.265.000	8.250.000	24,08	8.250.000	24,07	16.500.000	24,08	-	24,08	33.000.000	96,31	33.000.000	47,14	DLH
1	Penyusunan & Penetapan RPPLH Kab/Kota		Dokumen DDDTLH, dokumen RPPLH dan legalisasi RPPLH	1 dokumen legalisasi (DDDTLH)	70.000.000	20.950.000	1 Dokumen	34.265.000	8.250.000	24,08	8.250.000	24,07	16.500.000	24,08	-	24,08	33.000.000	96,31	53.950.000	77,07	DLH
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS) Kab/kota			Jumlah KLHS	2 Dokumen	450.000.000		2 Dokumen	2.500.000.000	10.500.000	1,83	120.150.000	20,92	182.250.000	29,91	805.564.000	23,65	1.118.464.000	76,31	1.118.464.000	248,55	DLH
2	Pembuatan & Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Dokumen KLHS RDTR kawasan perkotaan/perdesaan	2 dokumen (KLHS RDTR)	450.000.000	210.440.000	12 Dokumen	2.500.000.000	10.500.000	1,83	120.150.000	20,92	182.250.000	29,91	805.564.000	23,65	1.118.464.000	76,31	1.328.904.000	295,31	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			PERESNTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PADA USAHA/KEGIATAN	100%	90.000.000		100%	905.285.000	29.556.780	8,62	39.365.370	11,48	95.291.450	19,16	69.434.110	22,13	233.647.710	61,39	233.647.710	259,61	DLH
Penyimpanan Sementara Limbah B3			Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	90.000.000		100%	905.285.000	29.556.780	8,62	39.365.370	11,48	95.291.450	19,16	69.434.110	22,13	233.647.710	61,39	233.647.710	259,61	DLH
1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	1 Laporan	90.000.000	84.079.345	1 Laporan	905.285.000	29.556.780	8,62	39.365.370	11,48	95.291.450	19,16	69.434.110	22,13	233.647.710	61,39	317.727.055	353,03	DLH

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s/d Akhir Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD	Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp	T 1		T 2		T 3		T 4		Rp	K			
									Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	390.000.000		100%	69.515.000	16.500.000	23,74	16.500.000	24,10	33.000.000	23,39	1.265.000	25,59	67.265.000	96,81	67.265.000	17,25	DLH
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	390.000.000		100%	69.515.000	16.500.000	23,74	16.500.000	24,10	33.000.000	23,39	1.265.000	25,59	67.265.000	96,81	67.265.000	17,25	DLH
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dan jumlah sosialisasi	15 dokumen	110.000.000	44.950.000	15 dokumen	34.265.000	8.250.000	24,08	8.250.000	24,07	16.500.000	24,08	1.265.000	27,77	34.265.000	100,00	79.215.000	72,01	DLH
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas PPLH dan Fungsional PEDAL	2 orang	60.000.000	19.200.000	2 orang	35.250.000	8.250.000	23,40	8.250.000	24,12	16.500.000	22,69	-	23,41	33.000.000	93,62	52.200.000	87,00	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	83%	22.550.000.000		83%	22.210.000.000	1.121.846.220	15,52	1.245.836.380	17,65	2.391.996.140	18,28	1.496.989.111	32,90	6.256.667.851	84,34	6.256.667.851	27,75	DLH
Pengelolaan Sampah			Persentase Pengelolaan Sampah	83%	22.550.000.000		83%	22.210.000.000	1.121.846.220	15,52	1.245.836.380	17,65	2.391.996.140	18,28	1.496.989.111	32,90	6.256.667.851	84,34	6.256.667.851	27,75	DLH
1	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota		Tonase sampah yang terangkut/petugas kebersihan/petugas TPA	75.000 Ton	7.500.000.000	713.733.404	75.000 Ton	7.500.000.000	177.065.300	12,19	213.542.000	14,71	406.717.180	15,81	501.209.031	40,56	1.298.533.511	83,27	2.012.266.915	26,83	DLH
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah TPST3R/unit/alat berat	1.500 Unit	14.710.000.000	7.577.702.137	1.500 Unit	14.710.000.000	944.780.920	18,84	1.032.294.380	20,58	1.985.278.960	20,74	995.780.080	25,24	4.958.134.340	85,40	12.535.836.477	85,22	DLH
Rata-rata capaian kinerja(%)										19,95		21,86		22,67		26,85		91,33			
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: - Motivasi dan Etos kerja yang baik dalam usaha untuk mencapai target kinerja serta kelancaran administrasi yang ditandai dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang efektif																					
Faktor Penghambat : - Pendanaan yang tidak memadai sehingga dalam beberapa urgensi terhambat pelaksanaannya - Minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia serta fasilitas yang memadai																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*):																					

*) diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun
Kuala Tunggal, tanggal 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT


SUPARJO, SE
Nip. 19680116 199703 1 002

Dievaluasi
Kuala Tunggal, tanggal 2022
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

Dr. H. KATAMSO, SA., SE., ME.
Nip. 19730116 200012 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten dan ibu kota, tentu memiliki permasalahan Lingkungan Hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan baik seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas membidangi Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas. Berikut tabel analisis kinerja pelayanan OPD:*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

Berikut Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL / AMDAL)	100%	Persentase Jumlah usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL / AMDAL) terhadap seluruh usaha / kegiatan yang wajib UKL-UPL / AMDAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah usaha dan kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran air	100%	persentase dunia usaha dan kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran air	80	92	95	95	92	95
3	Jumlah usaha dan kegiatan tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran udara	100%	Persentase usaha dan kegiatan tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah pengaduan yang diterima	100%	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah volume sampah setiap tahunnya	100%	Persentase penanganan/ pengelolaan sampah	65.000 Ton	70.000 Ton	75.000 Ton	14.499 Ton	11.428,2 Ton	14.499 Ton

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dibidang Persampahan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih, terutama di Kota Kuala Tungkal. Terlihat dari data volume sampah yang dari tahun ke tahun selalu meningkat, per-Desember 2022 volume sampah yang masuk ke TPA sebanyak 14.499 Ton sampah (perhitungan hasil dari muatan kontainer sampah), selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah domestik dan rumah tangga juga keterbatasan dana untuk mengolah daur ulang sampah.

Pertumbuhan pemukiman penduduk yang tinggi di daerah perkotaan sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat diakibatkan karena aktivitas ekonomi dan pusat pemerintahan, sehingga menyebabkan pemukiman di daerah ini menjadi semakin padat. Hal ini memacu peningkatan permintaan lahan dan daya dukung lingkungan untuk pemukiman atau perumahan, keterbatasan lahan di Kecamatan Tungkal Ilir Khususnya Kota Kuala Tungkal yang berada di daerah dataran rendah merupakan daerah genangan air, Tidak sedikit areal bantaran sungai yang dijadikan tempat pemukiman yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendangkalan sungai, ini menjadi salah satu penyebab banjir atau naiknya air laut melimpah ke jalan ketika terjadi pasang besar (rob) pada bulan-bulan tertentu. Banyak pertumbuhan dunia usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdampak terhadap lingkungan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas atau kerusakan lingkungan karena air limbah yang mengalir dipesisir sungai dan laut yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk pengukuran Titik sampling diperlukan penambahan titik sampling pengukuran udara dan air serta untuk melakukan pengukuran sendiri Indeks Tutupan Lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar nilai Indeks Lingkungan yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tahun 2022 Indeks Kualitas Air (IKA):61,429, Indeks Kualitas Udara (IKU):90,12 (kualitas

Baik), serta Indeks Kualitas Lahan (IKL):54,94. dan menghasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):69,61.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir (2016 – 2021), dalam pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang mana belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan ini diperburuk lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 – 2026, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah dalam Ibukota Kabupaten/ Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan - lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (Climate Change) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020, merupakan komitmen yang harus

ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2021-2026 melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, tetapi merupakan peluang dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut :

- a)** Masih sedikitnya jumlah personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik – teknik pengendalian dampak lingkungan.
- b)** Masih lemahnya kinerja personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c)** Masih lemahnya proses komunikasi timbal balik antara Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pihak yang berkompeten dan stakeholder lainnya.
- d)** Masih kurangnya kendaraan operasional untuk kelapangan.

BAB III

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang diukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi sesuatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan APBD dan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Renja Pendanaan Tahun 2023		Pendanaan Pada DPA Tahun 2023		Sesudah Perubahan Renja		Selisih	Kelompok Sasaran	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	12.222.015.000	100%	4.903.411.050	100%	6.826.381.150	- 1.922.970.100		
	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun		7 Laporan	1.600.000.000	7 Laporan	168.060.000	7 Laporan	173.060.000	- 5.000.000		DLH SEKRETARIAT
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	68.560.000	8 Dokumen	73.560.000	- 5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	99.500.000	4 Dokumen	99.500.000	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD		4 Laporan	4.338.165.000	4 Laporan	3.772.481.150	4 Laporan	3.816.481.150	- 44.000.000		DLH SEKRETARIAT
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	24 Orang/bulan	3.267.915.000	24 Orang/bulan	3.336.260.950	24 Orang/bulan	3.336.260.950	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	2 Dokumen	300.250.000	2 Dokumen	299.470.000	2 Dokumen	299.470.000	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	40.000.000	- 40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	81.400.200	4 Laporan	81.400.200	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	55.350.000	2 Dokumen	59.350.000	- 4.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventarisasi		1 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	-		DLH SEKRETARIAT
	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan		1 Dokumen	440.000.000	1 Dokumen	63.400.000	1 Dokumen	63.400.000	-		DLH SEKRETARIAT
	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	11.000.000	12 Laporan	11.000.000	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	13.000 Dokumen	110.000.000	13.000 Dokumen	52.400.000	13.000 Dokumen	52.400.000	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN		100%	500.000.000	100%	35.750.000	100%	85.750.000	- 50.000.000		DLH SEKRETARIAT
	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	68 Paket	60.000.000	68 Paket	35.750.000	68 Paket	85.750.000	- 50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum		100%	727.000.000	100%	385.014.300	100%	541.562.000	- 156.547.700		DLH SEKRETARIAT

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Renja Pendanaan Tahun 2023		Pendanaan Pada DPA Tahun 2023		Setelah Perubahan Renja		Selisih	Kelompok Sasaran	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	1.000 Paket	110.000.000	1.000 Paket	91.562.000	1.000 Paket	141.562.000	-	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	293.452.300	1 Laporan	400.000.000	-	106.547.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD			1035 unit	1.715.850.000	1035 unit	21.000.000	1035 unit	1.305.850.000	-	1.284.850.000	DLH SEKRETARIAT	
	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	16 Unit	100.000.000	16 Unit	-	16 Unit	100.000.000	-	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	13 Unit	105.850.000	13 Unit	-	13 Unit	105.850.000	-	105.850.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	1.000 Unit	1.100.000.000	1.000 Unit	21.000.000	1.000 Unit	1.100.000.000	-	1.079.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			4 laporan	466.000.000	4 laporan	153.278.000	4 laporan	223.278.000	-	70.000.000	DLH SEKRETARIAT	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	94.200.000	1 Laporan	164.200.000	-	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	56.078.000	1 Laporan	56.078.000	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			235 Unit	2.105.000.000	235 Unit	287.427.600	235 Unit	600.000.000	-	312.572.400	DLH SEKRETARIAT	
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	35 Unit	250.000.000	35 Unit	230.977.600	35 Unit	350.000.000	-	119.022.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100%	4 Unit	250.000.000	4 Unit	56.450.000	4 Unit	250.000.000	-	193.550.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup			3 Dokumen	850.000.000	3 Dokumen	479.330.000	3 Dokumen	549.520.000	-	70.190.000	
	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota	terlaksananya penyusunan dokumen DDDTLH, Dokumen RPPLH yang dilegalisasi			1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	49.520.000	1 dokumen	49.520.000	-	-	DLH (TATA LINGKUNGAN)	
	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	49.520.000	1 dokumen	49.520.000	-	-	Stakeholder Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
	2.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah KLHS			2 Dokumen	550.000.000	2 Dokumen	429.810.000	2 Dokumen	500.000.000	-	70.190.000	DLH (TATA LINGKUNGAN)	
	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	1 dokumen	2 dokumen	550.000.000	2 dokumen	429.810.000	2 dokumen	500.000.000	-	70.190.000	Masyarakat Daerah Perencanaan Detail Tata Ruang	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Renja Pendanaan Tahun 2023		Pendanaan Pada DPA Tahun 2023		Sesudah Perubahan Renja		Selisih	Kelompok Sasaran	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/IKEG			65,5/94,4/56,7/7,8/74,4	1.060.000.000	65,5/94,4/56,7/7,8/74,4	277.700.000	65,5/94,4/56,7/7,8/74,4	397.700.000	- 120.000.000		
	2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			2 Laporan	730.000.000	2 Laporan	253.000.000	2 Laporan	373.000.000	- 120.000.000		DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)
	01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	IKA: 64,3 IKU : 93,68 IKTL: 52,09	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	127.000.000	1 Dokumen	247.000.000	- 120.000.000	Masyarakat	
	02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	-	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	126.000.000	1 Dokumen	126.000.000	-	Masyarakat	
	2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)			1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	24.700.000	1 Dokumen	24.700.000	-		DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)
	05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	-	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	24.700.000	1 Dokumen	24.700.000	-	Masyarakat	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			75%	4.905.000.000	75%	1.126.386.000	75%	4.698.300.000	- 3.571.914.000		
	2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			75%	4.905.000.000	75%	1.126.386.000	75%	4.698.300.000	- 3.571.914.000		DLH (PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)
	01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		1 Dokumen	445.000.000	1 Dokumen	38.300.000	1 Dokumen	238.300.000	- 200.000.000	Masyarakat	
	04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	Persentase RTH yang terkelola	20 Ha	3.460.000.000	20 Ha	652.150.000	20 Ha	3.460.000.000	- 2.807.850.000	Masyarakat	
	07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	Terlaksana nya penanaman (Di desa tunggal 1)	18 Unit (Taman)	1.000.000.000	18 Unit (Taman)	435.936.000	18 Unit (Taman)	1.000.000.000	- 564.064.000	Masyarakat	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada usaha/kegiatan			100%	500.000.000	100%	198.217.600	100%	500.000.000	- 301.782.400		
	2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3			100%	500.000.000	100%	198.217.600	100%	500.000.000	- 301.782.400		DLH (PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3)
	02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	3 rekomendasi yang telah dikeluarkan	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	198.217.600	1 Laporan	500.000.000	- 301.782.400	Dunia Usaha dan Masyarakat	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			100%	460.000.000	100%	156.520.000	100%	156.520.000	-		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Renja Pendanaan Tahun 2023		Pendanaan Pada DPA Tahun 2023		Sesudah Perubahan Renja		Selisih	Kelompok Sasaran	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas	100%	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	37.760.000	3 Dokumen	52.760.000	- 15.000.000	Masyarakat		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	85%	16.760.000.000	85%	6.542.850.710	85%	16.400.471.000	- 9.857.620.290	
		2.01			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	85%	16.760.000.000	85%	6.542.850.710	85%	16.400.471.000	- 9.857.620.290	DLH (PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3)
	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas	16.425 Ton/M ³ /320 / 19 orang	78.000 Ton	8.000.000.000	78.000 Ton	1.622.348.600	78.000 Ton	4.000.000.000	- 2.377.651.400	Masyarakat		
	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		10 Kelompok	160.000.000	10 Kelompok	60.756.000	10 Kelompok	100.471.000	- 39.715.000	Masyarakat		
	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas	4 TPST3R/ Dumptruck 7 unit (1 rusak berat)/ Excavator 2 unit (1 rusak ringan)/ backhoe loader 1 unit (rusak berat)/ Armroll 1 unit / peralatan kebersihan	1.120 Unit	8.300.000.000	1.120 Unit	4.859.746.110	1.120 Unit	12.300.000.000	- 7.440.253.890	Masyarakat		
						37.437.015.000		13.786.375.360		29.821.652.150	- 16.035.276.790			

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina TK I/ Ivb
NIP. 19680116 199703 1 002

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja tahunan ini memuat program - program dan kegiatan - kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di tahun mendatang.